

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Dalam Bab II ini, akan dibahas konsep dan teori yang berhubungan dengan kajian atau permasalahan penelitian, seperti kajian habituasi (Waldi, 2022), kajian taushiah (Lutfia Septiyani, 2020), dan *civic responsibility* di dalam *civic disposition* (Branson, 1999).

2.1 Kajian Habituasi dan Tausiah

2.1.1 Pengertian Habituasi

Pembiasaan di sekolah merupakan upaya untuk membentuk karakter yang toleran, dengan sekolah berperan sebagai wadah pembentukan karakter (*communities of character*). Strategi pendidikan melalui pembiasaan ini berfungsi sebagai faktor eksternal dalam pengembangan karakter toleransi (Yosiphanungkas & Mandayu, 2020, hlm. 32). Diperkuat dalam pandangan Waldi (2022, hlm. 49) habituasi ialah proses penciptaan situasi dan kondisi (*Persistence life situation*). Situasi tersebut memfasilitasi siswa di berbagai tempat untuk mempraktikkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dari kepribadian mereka setelah mereka mengadopsi dan mengekspresikannya melalui bantuan atau campur tangan.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa habituasi adalah proses di mana pembelajaran dilakukan secara bertahap untuk membentuk karakter, serta sebagai strategi pembelajaran di dunia pendidikan yang dapat diterapkan di sekolah untuk mengembangkan pembelajaran berbasis etika dan moral dalam membentuk karakter toleransi. Habituasi dilakukan secara berulang-ulang dengan sengaja untuk membentuk kebiasaan. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman yang terus-menerus, dengan pengulangan sebagai inti dari pembiasaan. Pendekatan ini efektif dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, seperti ketika orang tua membiasakan anak-anaknya untuk bangun pagi, yang akhirnya menjadi kebiasaan (Waldi, 2022, hlm. 54).

Dengan demikian, pembiasaan dalam membangun karakter peserta didik merupakan proses berkelanjutan di mana individu mengembangkan perilaku, nilai-nilai, dan sikap positif dalam konteks pendidikan. Tujuan dari proses ini merupakan

membentuk karakter peserta didik menjadi individu yang baik, beretika, dan bermoral. Metode pengulangan (habitiasi) memungkinkan siswa untuk menerapkan teori secara langsung, sehingga teori yang sulit dipahami menjadi lebih mudah melalui latihan yang teratur.

2.1.2 Langkah-Langkah Habitiasi

Menurut ngalim di dalam Waldi (2022, hlm. 53), untuk mencapai hasil yang baik dalam pembiasaan, beberapa syarat harus dipenuhi, seperti:

- a. Memulai proses pembentukan kebiasaan sejak usia dini adalah penting agar peserta didik tidak mengembangkan kebiasaan yang bertentangan dengan tujuan pembentukan tersebut.
- b. Menerapkan kegiatan secara terus-menerus dan terjadwal, sehingga pada akhirnya menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa disadari.
- c. Melakukan pendidikan dengan konsistensi, sikap tegas, dan tekad terhadap prinsip-prinsip yang diadopsi, agar tidak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melanggar aturan pembiasaan.
- d. Awalnya, pembiasaan mekanistik harus berkembang menjadi pembiasaan yang disertai dengan kesadaran internal peserta didik.

Dari langkah-langkah sebelumnya, dapat ditekankan maka pendidikan kepada para peserta didik sebaiknya dimulai sejak awal, karena hal ini akan menjadi dasar untuk tahap-tahap berikutnya. Pembiasaan perlu dilakukan secara berulang-ulang dan teratur, sedangkan pendekatan dalam mendidik harus dilakukan dengan ketegasan dan konsistensi. Pembiasaan yang efektif merupakan yang dapat meresap hingga kedalam hati para peserta didik, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang diingat dan dilakukan tanpa perlu pengingat eksternal.

Berdasarkan perspektif Waldi (2022, hlm. 56) pendidikan melalui pembiasaan dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang mendalam dan dalam aktivitas sehari-hari. Ini melibatkan pengaturan khusus dalam jangka waktu tertentu untuk mengembangkan karakter peserta didik, baik secara individu, dalam kelompok, atau dalam konteks kelas.

- a. Pengenalan kebiasaan tanpa jadwal bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah ini:

- 1) Pembiasaan secara rutin, yang mencakup kegiatan yang terjadwal, seperti upacara bendera, senam, shalat berjamaah, menjaga keteraturan, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kesehatan secara teratur.
- 2) Kebiasaan yang timbul secara spontan adalah kebiasaan yang muncul tanpa perencanaan khusus, seperti memberikan salam, membuang sampah pada tempatnya, mengantre, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai.
- 3) Pembiasaan melalui contoh teladan adalah saat seseorang mencontohkan perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, menggunakan bahasa yang sopan, membiasakan diri untuk membaca secara teratur, memberikan pujian atas kebaikan dan kebersihan orang lain, serta menjaga keteraturan waktu dengan datang tepat waktu.

Secara keseluruhan, kegiatan pembiasaan di SMK Negeri 4 Kota Bandung merupakan upaya berkelanjutan, berulang-ulang, dan bertahap serta konsisten untuk mengubah peserta didik ke arah yang lebih positif. Tujuannya adalah untuk membangun karakter peserta didik agar memiliki tanggung jawab sosial dan pengalaman hidup yang dapat terus diterapkan dalam kehidupan mereka.

2.1.3 Pengertian Tausiah

Mengenai tausiah tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang dakwah, karena tausiah merupakan bentuk dakwah yang dilakukan melalui lisan (Lutfia Septiyani, 2020). Dari segi etimologi, tausiah adalah bentuk penyampaian pesan yang mengajak atau mendorong orang lain untuk mematuhi seruan tertentu. Menurut M. Natsir, dalam terminologi, tausiah mencakup ajakan yang mengandung *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, ajakan ini dilakukan tidak hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan tindakan, komunikasi non-verbal, dan sikap yang mulia secara konkret (Lutfia Septiyani, 2020). Tausiah tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, melainkan sebagai ajakan kepada penerima untuk menerima pemahaman agama dengan cara memperlakukan mereka sebagai tamu yang dihormati, sebagaimana terdapat dalam firman Allah (QS. Al-Ashr : 3) : Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

Dengan demikian, tausiah secara umum dapat dianggap sebagai bentuk dakwah Islam yang bertujuan mengajak orang lain agar mengetahui sikap dan

perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Keberhasilan seorang *mubaligh* diukur berdasarkan kemampuannya menyampaikan pesan Islam, sementara respons masyarakat terhadap pesan tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya. Cita-cita dakwah menurut (Iskandar, 2001, hlm. 92) dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mengajak manusia menuju tindakan yang baik (*al-amr bilma'ruf*) dan mendorong mereka untuk menjauhi perbuatan buruk (*al-nahyu 'anil-munkar*), dengan maksud mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, prinsip dakwah pada dasarnya adalah usaha mengajak dan menganjurkan agar individu bersedia menerima kebaikan serta petunjuk yang tersirat dalam Islam. Karenanya, tausiah menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep dakwah, yang merupakan usaha mengajak individu untuk menerima kebaikan dan petunjuk dalam ajaran Islam tanpa paksaan.

2.1.4 Unsur-Unsur Tausiah

Dalam melakukan dakwah atau menyampaikan ajaran Islam, terdapat beberapa komponen penting (Pimay, 2005, hlm. 6), yakni:

1. *Da'i* (Pelaku Dakwah):

Da'i mengacu pada individu atau kelompok yang melakukan kegiatan dakwah melalui kata-kata, tulisan, atau tindakan. Aktivitas ini dapat dilakukan secara pribadi, dalam kelompok, atau melalui organisasi.

2. *Mad'u* (Sasaran Dakwah):

Mad'u atau penerima dakwah mencakup seluruh umat manusia, tanpa memandang jenis kelamin, usia, status sosial, atau keberagamaan. Semua individu menjadi sasaran dakwah Islam, dan mereka berhak menerima ajakan serta seruan menuju jalan Allah.

3. *Maddah* (Materi Dakwah):

Materi dakwah terdiri dari pesan-pesan dan seluruh ajaran agama Islam yang harus disampaikan oleh *da'i* kepada penerima dakwah. Materi ini bersumber dari Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul.

4. *Wasilah* (Media Dakwah):

Wasilah atau media dakwah merujuk pada segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah. Ini mencakup sarana dan prasarana

yang digunakan oleh *da'i* untuk menyampaikan materi dakwah. Media dakwah dapat dibagi menjadi lima kategori utama.

5. *Thariqah* (Metode Dakwah):

Thariqah atau metode dakwah merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada penerima. Pemilihan metode ini sangat penting untuk memastikan tujuan dan target dakwah tercapai.

6. *Atsar* (Efek Dakwah):

Setiap tindakan dakwah akan menimbulkan reaksi atau dampak pada dirinya sendiri. Setelah seorang *da'i* atau ustadz melakukan dakwah dengan materi, media, dan metode tertentu, akan muncul respons atau dampak pada penerima dakwah. Dampak ini mencerminkan efek atau tanda yang timbul dari kegiatan dakwah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada enam elemen dalam kegiatan dakwah, yakni *Da'i, Mad'u, Maddah, Wasilah, Thariqah, dan Atsar*. Pada intinya, tujuan utama merupakan menyampaikan pesan dengan cara yang mampu memengaruhi orang lain secara positif, dalam mencapai hati dan pikirannya.

2.2 Kajian Civic Education

2.2.1 Pengertian Civic Education

Dalam konteks kompetensi kewarganegaraan (*Civic Education*) yang didefinisikan oleh Branson (1999, hlm. 4), dalam konteks demokrasi bertujuan untuk memajukan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemerintahan mandiri, pemerintahan mandiri yang demokratis mengandalkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya menerima perintah atau memenuhi permintaan dari pihak lain. Ini diperkuat oleh pendapat Benjamin dalam demokrasi konstitusional, pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang efektif tidak bisa diabaikan karena dalam masyarakat demokratis, partisipasi aktif, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran dalam berinteraksi di lingkungan yang beragam menjadi kunci. Kemampuan empati untuk mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain juga sangat penting. Semua hal ini membutuhkan keterampilan yang memadai (Branson, 1999, hlm. 5).

Dalam pandangan Azmi (2016, hlm. 78), *Civic Education* merupakan kebutuhan yang mendasar bagi bangsa. Hal ini menyatakan bahwa *Civic Education*

menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi suatu negara atau komunitas. Ini berarti bahwa pendidikan tentang bagaimana menjadi warga yang aktif, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan politik negara merupakan hal yang sangat esensial. Tanpa pendidikan kewarganegaraan yang baik, warga negara mungkin tidak akan memiliki pemahaman yang memadai tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam membangun dan menjaga negara mereka. Dengan demikian, paragraf tersebut menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya penting, tetapi juga menjadi landasan bagi keberhasilan dan keberlanjutan suatu bangsa.

Diperkuat dalam pandangan Damri (2020, hlm. 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai yang menjadi fondasi masyarakat dan negara, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan status sebagai warga negara. Dengan kata lain, melalui *civic education*, individu diberi pemahaman tentang prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga membantu individu untuk memahami peran mereka sebagai anggota masyarakat dan negara, serta hak-hak yang mereka miliki dan kewajiban yang harus mereka penuhi dalam menjaga dan memajukan kehidupan bersama. Dengan demikian, paragraf tersebut menyoroti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk individu yang sadar akan tanggung jawab dan peran mereka dalam membangun komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari berbagai penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan dari *civic education* dalam demokrasi merupakan untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi warga dalam pemerintahan yang independen. Dalam pemerintahan yang demokratis, keputusan tidak hanya dibuat oleh pihak tertentu saja, tetapi melalui proses yang melibatkan aktifitas warga secara langsung. Artinya, warga tidak hanya menjadi penerima perintah atau memenuhi permintaan dari otoritas, tetapi mereka juga terlibat secara aktif dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

2.2.2 Pembagian Dimensi *Civic Education*

Dalam *civic education* Terdapat tiga aspek utama yang menjadi acuan agar *civic education* ini bermutu, yaitu: *Civic knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan). *Civic skill* (Kecakapan Kewarganegaraan). dan *Civic disposition* (Watak Kewarganegaraan) (Branson, 1999, hlm. 8). Berikut merupakan penjelasan singkat tentang setiap dimensi tersebut:

2.2.2.1 *Civic Knowledge*:

Civic knowledge merujuk pada pemahaman individu tentang konsep-konsep dasar, prinsip, dan struktur pemerintahan, hukum, hak, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Ini melibatkan pengetahuan tentang sejarah politik, sistem politik, proses pengambilan keputusan, hak asasi manusia, dan topik-topik terkait lainnya yang memengaruhi tatanan sosial dan politik suatu negara (Branson, 1999, hlm. 9-11). Maka kesimpulannya bahwa "*civic knowledge*" mengacu pada pemahaman individu tentang konsep-konsep dasar, prinsip, dan struktur pemerintahan, hukum, hak, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Ini mencakup pengetahuan tentang sejarah politik, sistem politik, proses pengambilan keputusan, hak asasi manusia, dan topik-topik terkait lainnya yang memengaruhi tatanan sosial dan politik suatu negara. Dengan kata lain, "*civic knowledge*" merupakan pemahaman yang luas dan mendalam tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan berpolitik dan berwarga negara yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis.

2.2.2.2 *Civic Skill*:

Civic skill mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang kewarganegaraan dalam praktek sehari-hari. Ini termasuk kemampuan berpikir kritis, menilai informasi dengan cermat, berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang konstruktif, serta kemampuan untuk berkomunikasi efektif, berkolaborasi, dan beradaptasi dalam konteks politik dan sosial yang beragam (Branson, 1999, hlm. 17-19). Maka kesimpulannya bahwa "*civic skill*" merujuk pada kemampuan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi dengan teliti, aktif berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang membangun, serta kemampuan untuk

berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dalam berbagai konteks politik dan sosial. Dengan kata lain, "civic skill" memungkinkan individu untuk berperan secara aktif dan produktif dalam masyarakat demokratis, dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mempengaruhi perubahan positif dan berkontribusi pada pembangunan komunitas.

2.2.2.3 Civic Disposition:

Civic disposition merujuk pada karakter privat dan karakter publik uan, nilai, dan keyakinan individu terhadap kewarganegaraan dan keterlibatan dalam kehidupan politik dan sosial. Ini mencakup sikap positif seperti kepedulian, empati, tanggung jawab, toleransi, serta sikap terbuka terhadap perbedaan dan kemajemukan dalam masyarakat. *Civic disposition* juga melibatkan motivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses demokratis dan memperjuangkan keadilan sosial (Branson, 1999, hlm. 23-24). Maka kesimpulanya bahwa "*civic disposition*" mengacu pada karakter privat dan publik individu, nilai-nilai, dan keyakinan terhadap kewarganegaraan serta keterlibatan dalam kehidupan politik dan sosial. Ini mencakup sikap positif seperti kepedulian, empati, tanggung jawab, toleransi, serta sikap terbuka terhadap perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. *Civic disposition* juga melibatkan motivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses demokratis dan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, "*civic disposition*" menggambarkan sikap mental dan moral yang mendorong individu untuk bertindak sebagai warga negara yang mempunyai responsibility dan berperan aktif dalam memperkuat komunitas dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks *civic disposition* atau sikap kewarganegaraan. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai kedua karakter tersebut:

2.2.2.3.1 Karakter Privat:

Karakter privat mengacu pada sikap, nilai, dan perilaku individu dalam konteks kehidupan pribadi atau personal (Branson, 1999, hlm. 23). Ini mencakup aspek-aspek seperti integritas pribadi, etika, moralitas, dan tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Karakter privat melibatkan kesadaran individu terhadap nilai-nilai pribadi yang berkontribusi pada pembentukan kepribadian dan kesejahteraan diri sendiri. Berikut salah satu contoh karakter privat, tanggung-jawab pribadi Melakukan perawatan diri, menyokong

kebutuhan keluarga, menjaga, mengurus, dan mengedukasi anak-anak, mengakui tanggung jawab atas tindakan pribadi, menghargai hak-hak dan kepentingan orang lain, dan bertindak dengan kesopanan (Branson, 1999, hlm. 29).

2.2.2.3.2 Karakter Publik:

Karakter publik merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku individu dalam konteks partisipasi dan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat atau publik (Branson, 1999, hlm. 23). Ini termasuk sikap terbuka terhadap perbedaan, kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab sosial, serta keterlibatan aktif dalam proses demokratis dan pembangunan masyarakat. Karakter publik adalah kesadaran individu terhadap tanggung jawab dan peran mereka dalam masyarakat yang aktif serta bertanggung jawab. Ini mencakup kewajiban kewarganegaraan, seperti mematuhi hukum, menyadari isu-isu publik, berperan sebagai pemimpin ketika diperlukan, dan memenuhi kewajiban pajak, berpartisipasi dalam pemilihan umum, bersedia menjadi juri atau relawan di militer, mengawasi pemimpin politik dan lembaga pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, serta mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran, dan melayani masyarakat (Branson, 1999, hlm. 30).

Menurut data *National Standards for Civics and Government* yang di isi oleh Branson (1999, hlm. 23-25), karakter privat dan karakter publik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menjadi bagian dari komunitas yang independen, melibatkan kesadaran diri untuk mengemban tanggung jawab sesuai dengan norma yang berlaku tanpa intervensi eksternal. Ini meliputi pengakuan terhadap konsekuensi dan tindakan individu, serta pemenuhan kewajiban moral dan hukum sebagai bagian dari masyarakat demokratis.
- b. Melaksanakan tanggung jawab pribadi sebagai warga negara dalam ranah ekonomi dan politik, seperti merawat keluarga, membimbing anak-anak, memantau isu-isu publik, memberikan suara dalam pemilihan umum, membayar pajak, memberikan kesaksian di pengadilan, terlibat dalam kegiatan sosial, dan memainkan peran kepemimpinan sesuai dengan bakat individu.
- c. Menghormati martabat dan hak asasi manusia setiap individu, termasuk mendengarkan pendapat orang lain, bersikap sopan, menghargai hak-hak

warga negara lain, dan mematuhi prinsip mayoritas sambil tetap menghormati hak-hak minoritas untuk berpendapat berbeda.

- d. Terlibat secara efisien dan bijaksana dalam urusan kewarganegaraan, termasuk berpartisipasi dalam diskusi publik, melakukan penelitian sebelum memberikan suara, dan menimbang kapan kepentingan pribadi harus dikesampingkan demi kepentingan umum.
- e. Mendorong pertumbuhan demokrasi yang sehat, termasuk kesadaran akan informasi dan kebutuhan publik, menilai nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional, mengawasi tindakan pemimpin politik dan lembaga publik terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut, serta mengambil tindakan jika ada pelanggaran. Ini memotivasi warga negara untuk bertindak secara damai dan hukum dalam memperbaiki undang-undang yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana. Karakter kewarganegaraan ini sering diabaikan, padahal karakter publik dan pribadi merupakan fondasi demokrasi, dan mungkin lebih terbentuk melalui pengalaman dan pemahaman daripada melalui pendidikan formal.

Civic Disposition, dengan aspek-aspek publik dan privatnya, menjadi bagian integral dalam pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Ini mencakup sifat-sifat warga negara yang mendukung partisipasi dalam urusan kewarganegaraan, baik dalam konteks publik maupun privat. Pembangunan dan Pengembangan sikap kewarganegaraan di sekolah diinginkan agar dapat membentuk kepribadian peserta didik sehingga mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

2.2.2 Pengertian *Civic Responsibility* Peserta Didik di Dalam Karakter Privat *Civic Disposition*.

Civic responsibility, dianggap sebagai aspek fundamental dari karakter atau *civic disposition*. Sangat penting bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab warga negara ini. Untuk membudayakannya, karakter tanggung jawab warga negara perlu dibina dan ditanamkan sejak usia dini, terutama di kalangan siswa tingkat sekolah menengah atas. Pembentukan rasa tanggung jawab ini membutuhkan proses bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, proses pembangunan rasa tanggung jawab ini perlu melibatkan berbagai metode, salah

satunya merupakan kebiasaan menyelesaikan tugas-tugas sekolah, baik tugas individu maupun tugas kelompok (Cahyono & Karim, 2015). Seperti telah dijelaskan pada bagian definisi, dalam penerapan *Civic Disposition* di sekolah, perlu fokus pada karakter privat, yaitu tanggung jawab (*Civic Responsibility*). Menurut Widagdho (1991, hlm. 144), ia berpendapat bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran terhadap perilaku yang sengaja atau tidak sengaja. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh individu dalam masyarakat mencerminkan kesadaran akan konsekuensi yang harus ditanggung. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah respons yang mempengaruhi penilaian moral seseorang.

Kalimat itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pemikiran dan tindakan manusia. Tanggung jawab mencerminkan kesadaran diri dalam melaksanakan kewajiban dan hak tanpa tekanan. Jika seseorang baik itu masyarakat pada umumnya pemerintahan dan pada yang terfokus pada pendidikan yaitu peserta didik memiliki rasa tanggung jawab, tindakan yang diambilnya sudah melibatkan pertimbangan dan pemikiran terhadap segala risikonya. Tanggung jawab memiliki manfaat positif seperti memberikan usaha terbaik, menunjukkan contoh yang baik, dan memiliki kendali atas diri sendiri. Pelajaran tentang tanggung jawab dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tanggung jawab mencerminkan kedewasaan dalam berpikir dan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam berbagai situasi.

Untuk memperkuat argumen ini, Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 45) berpendapat bahwa warga negara yang mempunyai *responsibility* berusaha melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan warga negara diperlukan untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, dengan patuh pada aturan dan menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Tentunya kecerdasan warga negara di bangun dan di ajarkan melalui sebuah pendidikan di persekolahan oleh pendidik kepada peserta didik. Maka dari itu pembangunan karakter tanggung jawab harus di pupuk dari awal kelas persekolahan demi terciptanya *civic responsibility* yang baik.

Lalu dalam pandangan Prayitno (dalam Walidi, 2022, hlm. 11) karakter adalah kualitas pribadi yang cenderung tetap pada seseorang dan menjadi fondasi bagi perilaku yang mereka tunjukkan. Dalam pengertian ini, karakter mengacu pada sifat-sifat pribadi yang stabil dan merupakan dasar dari tingkah laku serta standar perilaku yang diperlihatkan oleh individu. Dengan kata lain, karakter mencakup kualitas dan atribut yang mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak dan bereaksi dalam berbagai situasi.

Dari berbagai pandangan yang telah disampaikan tentang kewajiban warga atau individu, mulai dari masyarakat umum hingga pekerja dan siswa, dapat disimpulkan bahwa kewajiban memiliki peran penting bagi setiap orang. Pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan, berperan sebagai alat untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab karena kewajiban membawa nilai-nilai, moral, dan norma yang menjadi dasar sikap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.2.2.1 Karakteristik dan Indikator *Civic Responsibility* Peserta Didik

Salah satu indikasi karakter positif seorang siswa dalam pendidikan kewarganegaraan adalah pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta kesadaran dan tanggung jawab dalam menerapkannya (U. Larasati, 2016, hlm. 274). Bahwa karakter positif seorang peserta didik dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan mencakup beberapa aspek. Pertama, hal tersebut mengindikasikan pemahaman yang kuat dari peserta didik terhadap hak-hak yang mereka miliki sebagai anggota masyarakat, termasuk kebebasan berpendapat, akses pendidikan, kesetaraan, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga menyadari tanggung jawab yang melekat pada status kewarganegaraan mereka, seperti kewajiban membayar pajak, patuh pada hukum, dan menghormati hak-hak individu lainnya. Lebih lanjut, pentingnya kemampuan peserta didik untuk secara sadar dan bertanggung jawab menerapkan pengetahuan mereka tentang hak dan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari ditekankan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengerti hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menghormati hak-hak orang lain serta memenuhi tanggung jawab mereka sebagai

warga negara. Selain itu, mereka juga memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, baik dalam lingkungan pribadi maupun sosial.

Character count di Amerika dalam (Waldi, 2022, hlm. 12) Mengenali bahwa sifat-sifat yang menjadi dasar dan perlu ditanamkan kepada para peserta didik meliputi sepuluh karakter utama, yaitu:

- a. Keandalan (*trustworthiness*), merupakan kemampuan atau sifat seseorang untuk dapat dipercaya dan diandalkan dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam kata maupun tindakan. Ini mencakup konsistensi, integritas, dan kepercayaan yang diberikan kepada individu dalam memenuhi komitmen dan mengambil keputusan yang tepat. Orang yang dapat diandalkan akan bertindak sesuai dengan yang dijanjikannya dan dapat diandalkan dalam situasi yang beragam.
- b. Penghargaan dan kepedulian (*respect*), merupakan sikap menghargai dan memperhatikan perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Ini melibatkan sikap hormat, empati, dan kesediaan untuk membantu serta menghargai keragaman dan perbedaan antar individu. Orang yang memiliki sikap ini akan memperlakukan orang lain dengan baik, menghormati hak mereka, dan bersikap peduli terhadap kesejahteraan serta kesuksesan orang lain.
- c. Tanggung Jawab (*responsibility*), merupakan kewajiban atau tugas yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan peran, posisi, atau hubungan mereka dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Ini mencakup kesadaran akan konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil, serta kesiapan untuk menghadapi akibat dari tindakan tersebut. Tanggung jawab juga melibatkan kemampuan untuk mengelola waktu, sumber daya, dan komitmen dengan baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Orang yang bertanggung jawab akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan tanpa dipaksa, dan siap menerima konsekuensi dari tindakan atau keputusan mereka.
- d. Jujur (*fairness*), merupakan sifat atau sikap yang mengarah pada kebenaran dan integritas dalam kata-kata, tindakan, dan perilaku seseorang. Ini melibatkan mengungkapkan fakta-fakta dengan jelas dan tidak menyesatkan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kekurangan diri sendiri dengan jujur. Orang

yang jujur akan berbicara dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang benar, tanpa melakukan penipuan, pengelakan, atau manipulasi. Jujur merupakan fondasi yang penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat dengan orang lain.

- e. Kepedulian (*caring*), merupakan sikap atau tindakan yang menunjukkan perhatian, empati, dan kepedulian terhadap keadaan, perasaan, atau kebutuhan orang lain. Ini melibatkan kesediaan untuk membantu, mendukung, atau mengasihani orang lain dalam situasi yang sulit atau membutuhkan bantuan. Orang yang memiliki kepedulian akan memperhatikan orang lain dengan baik, memahami perasaan mereka, dan bersedia untuk memberikan dukungan atau bantuan sebisa mungkin. Kepedulian juga mencakup sikap yang peduli terhadap lingkungan sekitar dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial atau lingkungan yang lebih luas.
- f. Kewarganegaraan (*citizenship*), merupakan konsep yang mencakup hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai anggota suatu negara atau masyarakat. Ini meliputi partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial negara, pemenuhan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang, serta kewajiban untuk mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Kewarganegaraan juga mencakup rasa identitas dan loyalitas terhadap negara atau masyarakat di mana individu tersebut tinggal. Orang yang memiliki kewarganegaraan yang baik akan berperan aktif dalam memajukan kepentingan bersama, menjaga perdamaian dan stabilitas sosial, serta memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi semua warga negara.
- g. Kejujuran (*honesty*), merupakan sifat atau sikap yang menuntut kebenaran dan integritas dalam segala hal, baik dalam kata-kata, tindakan, maupun perilaku. Orang yang jujur akan berbicara dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya, tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan informasi. Mereka akan mengakui kesalahan atau kekurangan dengan jelas dan terbuka, tanpa menyembunyikan atau mengelak dari tanggung jawab mereka. Kejujuran adalah nilai yang penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain, serta dalam mempertahankan integritas diri sendiri.

- h. Keberanian (*courage*), merupakan sifat atau sikap yang menunjukkan keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi ketakutan, tantangan, atau risiko yang mungkin timbul dalam kehidupan. Ini melibatkan kemauan untuk menghadapi situasi yang sulit atau menakutkan dengan kepercayaan diri dan tekad yang kuat. Orang yang memiliki keberanian akan berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi rintangan atau menghadapi situasi yang menantang, bahkan jika itu berarti keluar dari zona nyaman mereka. Keberanian juga mencakup kemauan untuk mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai yang benar, bahkan dalam menghadapi tekanan atau kritik dari orang lain.
- i. Kerajinan (*diligence*), merupakan sifat atau sikap yang menunjukkan ketekunan, kesungguhan, dan kesabaran dalam melakukan tugas atau pekerjaan dengan cermat dan teliti. Ini melibatkan komitmen untuk bekerja keras dan tekun untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta kemauan untuk meluangkan waktu dan energi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Orang yang rajin akan bekerja secara teratur dan konsisten, tidak mudah menyerah di hadapan kesulitan atau tantangan, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Kerajinan merupakan atribut yang penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam karier, pendidikan, maupun kehidupan pribadi.
- j. Kesatuan (*integrity*), merupakan keadaan atau kondisi di mana berbagai elemen atau individu saling bersatu atau bersatu padu, baik secara fisik maupun secara mental atau emosional. Ini melibatkan pembentukan ikatan atau hubungan yang erat antara berbagai bagian atau komponen, sehingga menciptakan keselarasan, harmoni, dan kekuatan kolektif. Dalam konteks sosial atau politik, kesatuan mengacu pada solidaritas dan persatuan antara berbagai kelompok atau individu, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama menuju tujuan bersama atau untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesatuan juga mencerminkan rasa identitas bersama dan rasa persaudaraan yang kuat di antara anggota suatu kelompok atau masyarakat.

Lalu dalam pandangan Lickona (dalam Waldi, 2022, hlm. 13) menyebutkan ada 10 karakter privat yang harus di terapkan di sekolah kepada para peserta didik,

(1) kebijaksanaan (*wisdom*); (2) daya tahan (*fortitude*); (3) kontrol diri (*self control*); (4) keadilan (*justice*); (5) cinta (*love*); (6) sikap positif (*positive attitude*); (7) kerja keras (*hard works*); (8) kepribadian yang utuh (*integrity*); (9) perasaan berterima kasih (*gratitude*); (10) kerendahan hati (*humility*). Kesimpulannya karakteristik pribadi yang dianggap penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah kepada para peserta didik. Ini termasuk kebijaksanaan, daya tahan, kontrol diri, keadilan, cinta, sikap positif, kerja keras, integritas, rasa terima kasih, dan kerendahan hati. Karakteristik ini dimaksudkan untuk membentuk seseorang dengan moral dan etika yang kokoh, serta mempromosikan pertumbuhan pribadi yang positif. Dengan mengembangkan aspek-aspek ini, diharapkan individu dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang memberi dampak positif dan bertanggung jawab.

Indikator *Civic Responsibility* Menurut Cogan (dalam Djahiri, 2002, hlm. 92) mengemukakan pendapatnya mengenai warga negara yang baik minimalnya harus memiliki indikator-indikator seperti Termasuk rasa identitas diri.

- a. Rasa kepribadian atau jati diri mandiri (*a sense od identity*). Yang artinya peserta didik harus mempunyai rasa kepribadian yang menjadi karakter utamanya sebagai jati diri mandirinya baik itu ketika di sekolah dan ketika di luar sekolah dan mampu menempatkan dirinya dengan baik di setiap lingkungannya.
- b. Rasa tanggung jawab akan kewajiban-kewajibannya (*obligation*) yang menjadi keharusannya. Yang artinya disini peserta didik harus mempunyai rasa tanggung jawab atas dirinya yang terpenting ketika ialah pada segala tingkah laku dan tindakan dirinya yang ia lakukan secara personal yang berdampak pada dirinya maupun orang di sekitarnya.
- c. Minat dan keterlibatan akan kepentingan umum (*public affairs*). Yang artinya disini peserta didik perlu mempunyai rasa sadar akan dirinya yang hidup di dalam masyarakat sekolah dan masyarakat umum, yang tentunya ia terlibat akan setiap kepentingan umum dan rasa sadar tadi menjadi sebuah minat dan prilaku yang di pakai untuk keterlibatan umum itu. Misalkan di sekolah maka peserta didik harus mengikuti aturan dan segala hal umum yang ada di lingkungan sekolah itu dan begitupun di lingkungan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, individu yang merupakan warga negara yang baik adalah orang-orang yang secara aktif terlibat dalam upaya memecahkan masalah di masyarakat. Selain itu, proses pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk karakter bangsa dengan mengembangkan berbagai aspek kompetensi kewarganegaraan, seperti kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial, serta memperkuat tanggung jawab warga negara terhadap generasi muda, serta menggalakkan partisipasi aktif dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Akibatnya, kesadaran dan tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat bukan hanya tentang pemahaman akan hak dan kewajiban, melainkan juga melibatkan kontribusi aktif dalam menyelesaikan permasalahan dan mengubah perilaku hidup. Ini berpotensi membawa dampak positif pada kenyamanan dan kualitas karakter tanggung jawab peserta didik di lingkungan sekolah.

2.2.2.2 Hubungan Habitiasi Tausiah dengan membangun *Civic Responsibility* Peserta Didik

Pembangunan dan pembentukan *civic responsibility* memerlukan metode tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pendidikan karakter di sekolah, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan, antara lain metode pembiasaan, pendidikan dengan perintah dan larangan, serta pendidikan dengan teladan (Waldi, 2022, hlm. 5). Sejalan juga dengan (Muthoharoh et al., 2013) mengungkapkan bahwa pembiasaan melibatkan melakukan sesuatu berulang kali agar perilaku atau sikap tertentu menjadi kebiasaan. Proses ini terjadi secara berulang guna membentuk individu agar mengadopsi sikap, perilaku, dan pemikiran yang diinginkan, dan itu dilakukan melalui pengalamannya saat melalui program dan kegiatan habituasi yang di alami.

Setiap habituasi yang diimplementasikan bertujuan mencapai peserta didik yang memiliki karakter tanggung jawab (Waldi (2022, hlm. 56-55), sehingga hal tersebut menjadi bagian dari diri seseorang dan membentuk kebiasaan (*habit*) pada dalam dirinya. Sehingga Muhibbin Syah (2010, hlm. 123), Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk membiasakan peserta didik agar dapat mengadopsi sikap dan kebiasaan yang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai yang berlaku pada saat dan tempat tertentu, serta sejalan dengan norma-norma moral, termasuk yang berkaitan

dengan agama, tradisi, dan budaya. Dengan demikian, habituasi bertujuan membangun sikap dan kebiasaan baru yang mengarah kepada perbaikan dalam membentuk peserta didik yang memiliki karakter tanggung jawab. Fokusnya pada pembiasaan yang melibatkan pengalaman peserta didik selama proses pelaksanaan. Penerapan habituasi yang tepat, dilakukan secara bertahap, berulang-ulang, dan *continue*, bertujuan untuk membangun karakter para peserta didik yang memiliki *civic responsibility*.

Lalu pada pandangan Waldi (2022, hlm. 14) sumber-sumber yang dapat digunakan untuk membangun karakter bisa berasal dari agama yang mengajarkan bahwa Tuhan hadir, serta menekankan untuk menjauhi larangan dan mematuhi perintah-Nya. Prinsip-prinsip dalam kehidupan bersama di dalam suatu negara seharusnya sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Dengan demikian, prinsip-prinsip pendidikan karakter harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama. Maka tausiah merupakan pilihan yang tepat jikalau ingin di sandingkan dengan prinsip penjelasan di atas yang memerlukan pengajaran dan penekanan dalam membangun nilai-nilai karakter.

Maka dari itu pembangunan *Civic Responsibility* peserta didik perlu dirancang secara terstruktur dan konkret, khususnya dengan menggunakan habituasi tausiah yang dilakukan secara praktis. Dalam konteks ini, terdapat proses penyampaian pengetahuan (*Delivery Knowledge*) yang dapat diajarkan dan diselipkan tentang *Civic Responsibility* kepada seluruh peserta didik secara serentak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun dibawah ini penelitian yang terdahulu membahas terkait pembahasan yang berkonteks dengan Habituasi tausiah dalam membangun *Civic Responsibility* Peserta didik di lingkup perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahma Yuniza, 2022) bertujuan untuk mengevaluasi **implementasi Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk *Civic Disposition* peserta didik di SMP Negeri 23 Bengkulu Selatan**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki dampak positif yang signifikan terhadap

Civic Disposition peserta didik SMP Negeri 23 Bengkulu Selatan. Secara khusus, peran pembelajaran PPKn menyumbang sebesar 50,8% terhadap pembentukan *Civic Disposition* peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran PPKn saat ini memberikan dampak positif dalam membentuk peserta didik agar memiliki kepemimpinan yang kuat di masa depan. Peran pembelajaran PPKn dalam membentuk *civic disposition* ini berfungsi sebagai platform untuk membentuk karakter dan sikap yang berorientasi sosial serta tanggung jawab bagi peserta didik. Sementara itu, 48,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar konteks pembelajaran PPKn.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Aida, 2019) bertujuan untuk **mengevaluasi pelaksanaan pembiasaan tausiah dalam mengembangkan nilai religius siswa di SMK Negeri 4 Kota Bandung**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiasaan tausiah memainkan peran penting sebagai sarana strategis, dari analisis dan penelitian lapangan, disimpulkan bahwa implementasi pembiasaan tausiah memiliki dampak positif pada pengembangan karakter religius peserta didik, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Selain memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai karakter religius, kegiatan ini juga berperan dalam pembentukan aspek lain dari karakter, seperti tanggung jawab, pemikiran kritis, toleransi, dan kejujuran. Penerapan pembiasaan tausiah disesuaikan dengan moto sekolah, yaitu KUAT MA'RIFAT (Konsisten, Ulet, Agamis, Terampil, Maju, dan Memberi Manfaat). Upaya pembiasaan tausiah di SMK Negeri 4 Bandung tidak hanya bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai religius, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (D. Larasati, 2022) memiliki tujuan untuk **meningkatkan kompetensi *Civic responsibility* dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menggunakan strategi Card Sort**. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan sebagai berikut, dalam pengembangan kompetensi *civic responsibility*, strategi Card Sort menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakfokusan peserta didik saat mengerjakan tugas kelompok dan kurangnya perhatian peserta didik saat teman mereka sedang melakukan presentasi di depan kelas. Untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut, guru memberikan solusi dengan melakukan pemantauan terhadap setiap kelompok peserta didik dan memberikan bimbingan serta kesempatan bertanya terkait materi yang disampaikan melalui strategi Card Sort. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas strategi Card Sort dalam mengembangkan kompetensi *civic responsibility* peserta didik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Purnama, 2022) memiliki tujuan untuk **mengevaluasi Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Civic Responsibility Peserta Didik di SMAN 1 Pringsewu**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran online di SMAN 1 Pringsewu belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dapat diamati melalui observasi langsung peneliti di lapangan. Dalam konteks ini, pola pembelajaran daring yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mengelola dan meningkatkan tingkat tanggung jawab peserta didik, baik jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka sebelumnya maupun dalam hal meningkatkan tanggung jawab tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pengawasan dari pendidik dan orang tua, yang turut berkontribusi pada rendahnya motivasi peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran online di SMAN 1 Pringsewu.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Wafik, 2021) memiliki tujuan untuk **mengevaluasi Implementasi Metode Habitiasi dan Kebijakan dalam Menegakkan Karakter Disiplin Siswa di SMK PGRI II Ponorogo**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pelaksanaan metode pembiasaan dan kebijakan dalam menegakkan karakter disiplin peserta didik dapat dirasakan oleh peserta didik dengan membawa perubahan yang signifikan bagi mereka. Dampak ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, melainkan juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari peserta didik. Peserta didik yang terlibat dalam implementasi metode pembiasaan dan kebijakan ini mengalami perubahan positif dalam disiplin mereka. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada perilaku peserta didik di sekolah, tetapi juga membawa dampak positif pada kehidupan sehari-hari mereka. Dengan terbiasanya peserta didik terhadap pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah, mereka menjadi lebih disiplin

dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari, membuktikan bahwa dampaknya tidak hanya bersifat situasional di lingkungan sekolah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengacu pada konsep yang menggambarkan narasi atau pernyataan proposisi tentang struktur kognitif yang mengarahkan pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang diakui atau dirumuskan. Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti berfungsi sebagai instrumen manusia, dan melalui teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam, peneliti secara aktif terlibat dan berinteraksi dengan sumber data. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap individu yang menyediakan data sangat penting bagi peneliti kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering melibatkan interaksi antara variabel pada objek penelitian, yang saling mempengaruhi secara interaktif. Dalam konteks ini, menetapkan variabel yang independen dan dependennya dengan jelas menjadi sulit. (Murdiyanto, 2020 hlm. 13). Jadi penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah konsep yang membantu memahami struktur kognitif dan mengarahkan pendekatan dalam penyelesaian masalah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik seperti observasi dan wawancara untuk berinteraksi dengan sumber data, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap individu yang berkontribusi. Metode penelitian kualitatif melibatkan interaksi variabel yang saling mempengaruhi, menyulitkan penentuan independen dan dependen secara jelas.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

